

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Harsono, Boedi. *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaaan*. Jakarta: Djambatan. 1999.

_____. *Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 2000.

_____. *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaanya*. Jakarta: Djambatan, 2007.

_____. *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaanya*. Djambatan: Jakarta. 2003.

_____. *Hukum Agraria Indonesia (Himpunan Peraturan Peraturan Hukum Tanah)*. Jakarta: Djambatan, 2000.

Irawat, James Julianto, *Surat Berharga Suatu Tinjauan Yuridis dan Praktis*. Jakarta: Prenandamedia Group. 2014.

Khairandy Ridwan. *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan Bagian Pertama*. Yogyakarta: FH UII Press, 2014.

Komariah. *Hukum Perdata*. Malang: UMM Press, 2010.

Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2014.

Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1981.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005.

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perjanjian*. Bandung: PT. Alumni, 2010.

Mustofa. *Tuntutan Pembuatan Akta-Akta PPAT*, Yogyakarta: KaryaMedia, 2014.

Nasional, Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN Balai Pustaka, 2008.

Nazir, Muhammad. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.

Perangin, Effendi. *Praktik Jual Beli Tanah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.

Rambe, Ropaun. *Hukum Acara Perdata Lengkap*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Salim HS, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

- _____. *Teknik Pembuatan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016.
- Santoso, Urip, *Pejabat Pembuat Akta Tanah Perspektif Regulasi, Wewenang dan Sifat Akta*, Jakarta: Kencana, 2016.
- _____. *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Satrio, J, *Hukum Perikatan Pada Umumnya*, Bandung: Alumni, 1993.
- Silalahi, Gabriel Amin. *Metode Penelitian dan Studi Kasus*. Sidoarjo: Citra Media, 2003.
- Situmorang, Victor M. dan Cormentya Sitanggang. *Aspek Hukum Akta Catatan Sipil di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 1991.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2009.
- _____. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986.
- Soenandar Taryana dkk. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2016.
- Soepomo, R. *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2005.
- Soerodjo, Irawan. *Hukum Pertanahan Hak Pengelolaan Atas Tanah (HPL) Eksistensi, Pengaturan dan Praktik*, Yogyakarta: LaksBang Mediatama, 2014.
- Subekti, R., dan Tjitrosoedibio. *Kamus Hukum*. Jakarta: Pradya Paramita, 1986.
- Sutedi, Adrian. *Peralihan Hak Tanah dan Pendaftarannya*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Syahjeini, Sutan Remy. *Hak Tanggungan Asas-asas, Ketentuan-ketentuan Pokok dan Masalah Yang Dihadapi oleh Perbankan (Suatu Kajian Mengenai UUHT)*. Bandung: Alumni, 1999.
- Syamsudin, M. *Mahir Meneliti Permasalahan Hukum*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Syarief, Elza. *Menuntaskan Sengketa Tanah*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2012.
- Tanzeh, Ahmad. *Metodologi Penelitian Praktis*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Tjandra, R. Riawan. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Yogyakarta, Cahaya Pustaka. 2005.
- Usman, Rachmadi, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2003.

B. Jurnal

- Aditama, Purna Noor, “Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Pada Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Jual Beli”, *Lex Renaissance*, 3, No. 1, (2018): 192, <https://journal.uii.ac.id/Lex-Renaissance/article/view/12739/pdf>.
- Antari, Putu Eva Ditayani, dkk, “Mekanisme Penyelesaian Sengketa Sertipikat Hak Atas Tanah Ganda Oleh Kantor ATR/BPN Kabupaten Manggarai Barat”, *Jolsic* 11, no. 1, (April 2023): 19, <https://dx.doi.org/10.2096 1/jolsic.v11i1.66947>.
- Baharudin. “Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Proses Jual Beli Tanah”, *Keadilan Progresif* 5, no. 1 (Maret 2014): 92, <https://jdihn.go.id/files/878/441-831-1-SM.pdf>.
- Bakri, Muhammad. “Unifikasi Dalam Pluralisme”, *Kertha Patrika* 33, no.1, (Januari 2008): 3, <https://doi.org/10.24843/KP.2008.v33.i01.p07>.
- Hamidi dan Moh Abdul Latif., “Penyelesaian Sengketa Pertanahan Di Wilayah Madura Secara Mediasi Oleh Badan Pertanahan Nasional”. *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 12, no. 1, (Juni 2021): 51, <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/index>.
- Kayungyun, Inggrid Rahadyan dan Mahendra Wardhana. “Analisis Yuridis Putusan Nomor: 15/Pdt.G/2017/PN.KRG Tentang Pemindahan Hak Melalui Jual Beli Yang Dilakukan Dihadapan PPAT Sebelum Pembayaran Objek”, *Novum Jurnal Hukum* 8, no. 3, (Januari 2021): 3, <https://doi.org/10.2674/novum.v0i0.37640>.
- Khairina. “Sertipikat Cacat Hukum Dalam Hukum Pertanahan Di Indonesia”, *Juris* 13, no. 1, (Juni 2014): 32, <https://media.neliti.com/media/publications/270148-sertipikat-cacat-hukum-dalam-hukum-perta-ff1b4b3e.pdf>.
- Kusuma, A.A. Gede Aditya, I Wayan Parsa, Nengah Suharta, “Kewenangan Badan Pertanahan Nasional Terhadap Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang Membatalkan Sertipikat Hak Atas Tanah”, *Kertha Negara*, 5, No. 5, (2017): 7, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthanegara/article/view/35112>.
- Permana, I Gusti Agung Dwi Satya dan I Ketut Sandi Sudarsana. “Kepastian Hukum Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Sebagai Kepemilikan Bidang Tanah”, *Kertha Semaya* 2, no. 5, (Juli 2014): 2, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/10498/7559>.
- Rajab, Rezeki Aldila, Bambang Eko Turisno, dan Anggita Doramia Lumbanraja. “Sertipikat Hak Atas Tanah Dalam Kepastian Hukum Pendaftaran Tanah”, *Notarius* 13, no. 2, (2020): 644, <https://doi.org/10.14710/nts.v13i2.31085>.
- Rondonuwu, Giovanni. “Kepastian Hukum Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Jual Beli Berdasarkan PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah”, *Lex Privatum* 5, no. 4, (Juni 2017): 114,

Siki, Renhat Malianus, I Gusti Nyoman Agung, dan I Nyoman Darmadha. “Kelayakan Saksi Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Hak Milik Atas Tanah Oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah”, *Kertha Semaya* 2, no. 2, (Oktober 2014): 2, <http://dx.doi.org/10.30659/sanlar.4.4.1011-1018>.

Suriadinata, Vincent, “Asas Presumptio Iustae Causa Dalam KTUN: Penundaan Pelaksanaan KTUN Oleh Hakim Peradilan Umum”, *Jurnal Ilmu Hukum Refleksi Hukum* 2, No. 2, (2018): 143, <https://doi.org/10.24246/jrh.2018.v2.i2.p139-152>.

Suryandari, Ratri Puspita, Lita Tyesta ALW, dan Adya Paramita Prabandari, “Akibat Hukum Tidak Terpenuhinya Syarat-Syarat Pembuatan Akta Jual Beli Oleh Notaris”, *Notarius*, 13, No.2, (2020): 835 <https://doi.org/10.14710/nts.v13i2.31170>.

Winandra, Desvia dan Hanafi Tanawijaya. “Penerapan Asas Terang dan Tunai Dalam Jual Beli Tanah Yang Merupakan Harta Bersama Dalam Perkawinan (Studi Putusan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN.LBT)”, *Jurnal Hukum Adigama* 3, no. 2, (Desember 2020):10, <https://doi.org/10.24912/adigama.v3i2.10556>.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang Undang Hukum Perdata.

Herzien Inlandsch Reglement.

Rechtreglement voor de Buitengewesten.

Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043).

Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3344).

Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4380).

Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5079).

Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076).

Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4432).

Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor

30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Tahun 2014, Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5491).

Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601).

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 59).

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pejabat Pembuat Akta Tanah (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3746).

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6630).

Peraturan Menteri Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Tahun 1997, Nomor 59).

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 3).

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1369).

D. Internet

Farlex. "Defect". <https://legal-dictionary.thefreedictionary.com/defect> (diakses 11 Desember 2023).

<https://magelangkab.go.id/images/dokumen/gambaran.pdf>, (diakses 23 Januari 2024).

Sangadji, Banyara, Amunuddin Salle dan Abrar Saleng. "Pelaksanaan Jual Beli Tanah Menurut Hukum Adat Dan Undang Undang Pokok Agraria Di Kecamatan Siriamau Kota Ambon". <http://pasca.unhas.ac.id/jurnal/files/97eaf4e23213cb4c08627d09e9f269a1.pdf> (diakses 17 November 2023).

Tri Jata Ayu Pramesti. "Arti Cacat Hukum". <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-cacat-hukum-lt556fa8a2b1100> (diakses 11 Desember 2023).

E. Skripsi, Tesis, dan/atau Disertasi



UNIVERSITAS
GADJAH MADA

**Penyelesaian sengketa Sertipikat Hak Milik yang didasarkan atas Akta Jual Beli yang Cacat Hukum
(Studi Kasus SHM No. 3015 dan AJB No. 407/2015)**

R. Meylanda Laksono Wibowo, Dr. Ninik Darmini, S.H., M.Hum.

Universitas Gadjah Mada, 2024 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>

Sahudi. “Akibat Hukum Bagi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Tanah Yang Tidak Sesuai Dengan Tata Acara Pembuatan Akta Tanah di Kabupaten Magelang” (*Tesis*, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2020).

Suharto, Rachmat. “Keberadaan Sertipikat Tanah Pada Jual Beli Yang Cacat Hukum” (*Tesis*, Universitas Airlangga, 2011).